



# **RENCANA KERJA**

## **BIRO HUKUM**

### **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN 2020**

**PALANGKA RAYA  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan 2016 – 2021, dan rencana kerja tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan target dan indikator kinerja pada program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Akhir kata, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja 2020 ini dan semoga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, Juni 2019

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**TTD**

**SARING, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650510 198703 1 003

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata pengantar .....                                                              | i  |
| Daftar Isi .....                                                                  | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                                                          | 1  |
| 1.1. Latar belakang .....                                                         | 1  |
| 1.2. Landasan hukum .....                                                         | 2  |
| 1.3. Maksud dan tujuan .....                                                      | 4  |
| 1.4. Sistematika penulisan .....                                                  | 5  |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016..                              | 6  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan<br>Capaian Renstra SKPD ..... | 6  |
| 2.1.1. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD<br>tahun 2018 .....                  | 6  |
| 2.1.2. Realisasi Belanja Kegiatan Tahun Anggaran<br>2018 .....                    | 6  |
| 2.1.3. Evaluasi dan Realisasi Belanja Kegiatan<br>Tahun Anggaran 2019. ....       | 6  |
| 2.1.4. Realisasi Belanja Kegiatan Tahun Anggaran<br>2019 .....                    | 7  |
| 2.1.5. Hambatan dan Kendala .....                                                 | 7  |
| 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD.....                                         | 15 |
| 2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....                                                | 15 |
| 2.2.2. Susunan Kepegawaian .....                                                  | 18 |
| 2.2.3. Sarana dan Prasarana .....                                                 | 19 |
| 2.2.4. Capaian Kinerja.....                                                       | 19 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi<br>SKPD ..... | 24 |
| 2.4. Review terhadap rancangan awal SKPD .....                      | 26 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan<br>Masyarakat .....     | 36 |
| BAB III. TUJUAN DAN SARAN .....                                     | 41 |
| 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional .....                     | 41 |
| 3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD .....                            | 42 |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....                           | 43 |
| BAB V. PENUTUP .....                                                | 55 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Tahun Anggaran 2020 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021, dimana Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Rencana Kerja (RENJA) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Tahunan (Renja SKPD) untuk menjabarkan Renstra SKPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5

tahun menjabarkan Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No.4286).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara No.4575).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah No. 34).
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85).
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2016.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan demikian maka dokumen Rencana Kerja Biro Hukum merupakan pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Biro Hukum dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA tahun 2020 oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III Tujuan dan Sasaran**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan**

#### **BAB V Penutup**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Tahun 2019 serta Capaian Renstra SKPD

##### 2.1.1. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018

Pagu Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 4.999.856.500,00** (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 0,00
- Belanja Langsung : Rp. 4.999.856.500,00

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 8 (*Delapan*) Program dan 31 (*Tiga Puluh Satu*) Kegiatan.

##### 2.1.2. Realisasi Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 4.873.856.500,00 atau 93,77% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.999.856.500,00.

##### 2.1.3. Evaluasi dan Realisasi Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.426.000.000,00** (*Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 0,00
- Belanja Langsung : Rp. 4.426.000.000,00

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 8 (Delapan) Program dan 32 (Tiga Puluh Dua) Kegiatan.

#### **2.1.4. Realisasi Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2019**

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.53.158.253,00 atau 1,06% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.995.255.000,00 (berdasarkan data realisasi per 31 Januari 2019).

Perkiraan capaian realisasi tahun berjalan s.d Triwulan I (2019) sebesar Rp. 999.051.000,00= 20%.

#### **2.1.5. Hambatan dan Kendala**

Adapun hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Belum diketapkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang penunjukan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga pertanggungjawaban APBD belum bisa dilaksanakan bila belum ada penetapan keputusan tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Hukum dan**  
**Pencapaian Renstra Biro Hukum s/d Tahun 2019**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

**Unit Kerja : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

| No | Kode                     | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |                                       |                       | Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Biro Hukum s/d Tahun berjalan |                                              |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                          |                                                                   |                                                                         |                                                                                       |                                                                             | Target Renja Biro Hukum Tahun 2018                           | Realisasi Renja Biro Hukum Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019                    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  |                          | 2                                                                 | 3                                                                       | 4                                                                                     | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                     | 8 = (7/6)             | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                               | 11=(10/4)                                    |
| A. | 4.01 . 4.01.03 . 01      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        |                                                                         |                                                                                       |                                                                             |                                                              |                                       |                       |                                                |                                                                          |                                              |
| 1  | 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 | Penyediaan Jasa surat menyurat                                    | Tersedia penyediaan dana untuk pengiriman surat menyurat dan pengiriman | 800                                                                                   | 0                                                                           | 10                                                           | 14                                    | 140%                  | 10                                             | 24                                                                       | 3%                                           |
| 2  | 4.01 . 4.01.3 . 01 . 03  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kantor.                        | 16                                                                                    | 5                                                                           | 1                                                            | 1                                     | 100%                  | 5                                              | 11                                                                       | 69%                                          |
| 3  | 4.01 . 4.01.3 . 01 . 07  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Terpenuhinya penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan            | 228                                                                                   | 76                                                                          | 42                                                           | 42                                    | 100%                  | 42                                             | 160                                                                      | 70%                                          |
| 4  | 4.01 . 4.01.3 . 01 . 09  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                         | Meningkatnya dukungan pelayanan perbaikan peralatan kerja.              | 60                                                                                    | 13                                                                          | 5                                                            | 6                                     | 120%                  | 5                                              | 24                                                                       | 40%                                          |
| 5  | 4.01 . 4.01.3 . 01 . 18  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah   | 60                                                                                    | 17                                                                          | 6                                                            | 5                                     | 83%                   | 6                                              | 28                                                                       | 47%                                          |
| 6  | 4.01 . 4.01.3 . 01 . 19  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah             | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah  | 60                                                                                    | 17                                                                          | 12                                                           | 8                                     | 67%                   | 12                                             | 37                                                                       | 62%                                          |

| No | Kode                     | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                                             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |                                       |                       | Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Biro Hukum s/d Tahun berjalan |                                              |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                             | Target Renja Biro Hukum Tahun 2018                           | Realisasi Renja Biro Hukum Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019                    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  |                          | 2                                                                              | 3                                                                                                                 | 4                                                                                     | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                     | 8 = (7/6)             | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                               | 11=(10/4)                                    |
| B  | 4.01 . 4.01.3 . 05       | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                             |                                                              |                                       |                       |                                                |                                                                          |                                              |
| 7  | 4.01 . 4.01.3 . 05 . 114 | Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah                                | Meningkatkan kualitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 240                                                                                   | 40                                                                          | -                                                            | -                                     | -                     | -                                              | 40                                                                       | 17%                                          |
| 8  | 4.01 . 4.01.3 . 05 . 115 | Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah    | Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan teknis sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum          | 180                                                                                   | 0                                                                           | -                                                            | -                                     | -                     | -                                              | 0                                                                        | 0%                                           |
| 9  | 4.01 . 4.01.3 . 05 . 125 | Sosialisasi produk hukum daerah                                                | Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan dalam produk hukum daerah              | 64                                                                                    | 10                                                                          | 6                                                            | 2                                     | 33%                   | 6                                              | 6                                                                        | 9%                                           |
| C  |                          | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                             |                                                              |                                       |                       |                                                |                                                                          |                                              |
| 10 | 4.01 . 4.01.3 . 06 . 01  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                           | 30                                                                                    | 10                                                                          | 5                                                            | 5                                     | 100%                  | 5                                              | 20                                                                       | 67%                                          |

| No       | Kode                    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                            | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |                                       |                       | Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Biro Hukum s/d Tahun berjalan |                                              |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                         |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                             | Target Renja Biro Hukum Tahun 2018                           | Realisasi Renja Biro Hukum Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019                    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1        |                         | 2                                                                 | 3                                                                                                | 4                                                                                     | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                     | 8 = (7/6)             | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                               | 11=(10/4)                                    |
| 11       | 4.01 . 4.01.3 . 06 . 57 | Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro          | Tersusunnya Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro                                        | 72                                                                                    | 24                                                                          | 12                                                           | 12                                    | 100%                  | 12                                             | 48                                                                       | 67%                                          |
| <b>D</b> |                         | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>              |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                             |                                                              |                                       |                       |                                                |                                                                          |                                              |
| 12       | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 18 | Penyusunan Peraturan Daerah                                       | Mewujudkan peraturan daerah yang implementatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan    | 60                                                                                    | 45                                                                          | 10                                                           | 40                                    | 400%                  | 10                                             | 95                                                                       | 158%                                         |
| 13       | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 19 | Penyusunan Peraturan Gubernur                                     | Mewujudkan peraturan gubernur yang implementatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  | 300                                                                                   | 158                                                                         | 50                                                           | 63                                    | 126%                  | 50                                             | 271                                                                      | 90%                                          |
| 14       | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 20 | Penyusunan Keputusan Gubernur                                     | Mewujudkan keputusan gubernur yang implementatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  | 7600                                                                                  | 2560                                                                        | 1200                                                         | 1292                                  | 108%                  | 1200                                           | 5052                                                                     | 66%                                          |
| 15       | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 21 | Penyusunan Naskah Akademis                                        | Mewujudkan naskah akademis yang responsif dan solutif terhadap permasalahan dan kebutuhan daerah | 12                                                                                    | 1                                                                           | 2                                                            | 2                                     | 100%                  | 1                                              | 4                                                                        | 33%                                          |
| 16       | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 22 | Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan                           | Mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan   | 72                                                                                    | 1392                                                                        | 1260                                                         | 1395                                  | 111%                  | 1260                                           | 4047                                                                     | 5621%                                        |

| No | Kode                    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |                                       |                       | Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Biro Hukum s/d Tahun berjalan |                                              |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                         |                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                             | Target Renja Biro Hukum Tahun 2018                           | Realisasi Renja Biro Hukum Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019                    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  |                         | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                     | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                     | 8 = (7/6)             | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                               | 11=(10/4)                                    |
| 17 | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 23 | Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota                    | Meningkatnya evaluasi rancangan produk hukum kabupaten/kota yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kebutuhan masyarakat | 90                                                                                    | 28                                                                          | 179                                                          | 68                                    | 38%                   | 179                                            | 275                                                                      | 306%                                         |
| 18 | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 24 | Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota                   | Tertindakannya pengawasan refresif produk hukum daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan secara proporsional dan perlindungan hak-hak masyarakat      | 506                                                                                   | 172                                                                         | 81                                                           | 234                                   | 289%                  | 81                                             | 487                                                                      | 96%                                          |
| 19 | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 25 | Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota                              | Meningkatnya rancangan produk hukum kabupaten/kota yang akan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan                               | 2000                                                                                  | 752                                                                         | 327                                                          | 398                                   | 122%                  | 287                                            | 1437                                                                     | 72%                                          |
| 20 | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 27 | Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota    | Tersedianya rancangan instrumen hukum pemerintahan kabupaten/kota yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota           | 6                                                                                     | 2                                                                           | 0                                                            | 0                                     | 0%                    | 1                                              | 3                                                                        | 50%                                          |

| No | Kode                    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                         | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |                                       |                       | Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Biro Hukum s/d Tahun berjalan |                                              |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                             | Target Renja Biro Hukum Tahun 2018                           | Realisasi Renja Biro Hukum Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019                    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  |                         | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                     | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                     | 8 = (7/6)             | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                               | 11=(10/4)                                    |
| 21 | 4.01 . 4.01.3 . 26 . 28 | Pengkajian dan Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah | Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui Produk Hukum Daerah terlaksana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 100                                                                                   | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                     | 0%                    | 0                                              | 0                                                                        | 0%                                           |
| E  |                         | <b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM</b>                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                             |                                                              |                                       |                       |                                                |                                                                          |                                              |
| 22 | 4.01 . 4.01.3 . 42 . 02 | Pengembangan Kerjasama Kesadaran Hukum dan HAM                                                           | Tersedianya dokumen pengembangan kerjasama bidang hukum dan HAM                                                                                               | 6                                                                                     | 2                                                                           | 1                                                            | 1                                     | 100%                  | 1                                              | 4                                                                        | 67%                                          |
| 23 | 4.01 . 4.01.3 . 42 . 04 | Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM                                                     | Tersedianya dokumen rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasikan dengan peraturan HAM                                                            | 6                                                                                     | 2                                                                           | 1                                                            | 1                                     | 100%                  | 1                                              | 4                                                                        | 67%                                          |
| 24 | 4.01 . 4.01.3 . 42 . 05 | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan HAM                                                                   | Tersedianya dokumen tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan HAM                                                                        | 6                                                                                     | 2                                                                           | 1                                                            | 4                                     | 400%                  | 1                                              | 7                                                                        | 117%                                         |
| 25 | 4.01 . 4.01.3 . 42 . 06 | Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM                                                                        | Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan, diseminasi dan pendidikan HAM                                                                        | 18                                                                                    | 3                                                                           | 3                                                            | 1                                     | 33%                   | 3                                              | 7                                                                        | 39%                                          |

| No | Kode                    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                                                                                               | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |                                       |                       | Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Biro Hukum s/d Tahun berjalan |                                              |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                             | Target Renja Biro Hukum Tahun 2018                           | Realisasi Renja Biro Hukum Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019                    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  |                         | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                     | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                     | 8 = (7/6)             | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                               | 11=(10/4)                                    |
| F  |                         | <b>Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum</b>                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                             |                                                              |                                       |                       |                                                |                                                                          |                                              |
| 26 | 4.01 . 4.01.3 . 44 . 02 | Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi                                    | Tersedianya pemberian bantuan dan penanganan sengketa hukum litigasi kepada unsur pemerintah provinsi                                                               | 60                                                                                    | 16                                                                          | 10                                                           | 11                                    | 110%                  | 10                                             | 37                                                                       | 62%                                          |
| 27 | 4.01 . 4.01.3 . 44 . 03 | Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi                                | Tersedianya pemberian bantuan dan penanganan sengketa hukum non litigasi kepada unsur pemerintah provinsi                                                           | 95                                                                                    | 15                                                                          | 20                                                           | 3                                     | 15%                   | 20                                             | 38                                                                       | 40%                                          |
| 28 | 4.01 . 4.01.3 . 44 . 04 | Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan dan Produk Hukum                                  | Terlaksananya telaahan hukum terhadap dokumen Rancangan Kebijakan dan Produk Hukum serta Sosialisasi/penyuluhan hukum                                               | 4                                                                                     | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                     | -                     | 1                                              | 1                                                                        | -                                            |
| 29 | 4.01 . 4.01.3 . 44 . 05 | Penyelesaian Proses Penyerahan Gedung Busines Centre Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Terlaksananya mediasi penyelesaian proses penyerahan Gedung Batang Garing Business Center kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalimantan Tengah) | 2                                                                                     | 0                                                                           | 1                                                            | 1                                     | 100%                  | 1                                              | 2                                                                        | 100%                                         |
| 30 | 4.01 . 4.01.3 . 44 . 06 | Layanan dan Pertimbangan Hukum bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah                   | Tersedianya Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah                                                                               | 24                                                                                    | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                     | 0%                    | 0                                              | 0                                                                        | 0%                                           |

| No | Kode                    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 |                                       |                       | Target Program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Biro Hukum s/d Tahun berjalan |                                              |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                       |                                                                             | Target Renja Biro Hukum Tahun 2018                           | Realisasi Renja Biro Hukum Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019                    | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1  |                         | 2                                                                                          | 3                                                                                           | 4                                                                                     | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                     | 8 = (7/6)             | 9                                              | 10=(5+7+9)                                                               | 11=(10/4)                                    |
| G  |                         | Program Perencanaan Hukum                                                                  |                                                                                             |                                                                                       | 0                                                                           |                                                              |                                       |                       |                                                |                                                                          |                                              |
| 31 | 4.01 . 4.01.3 . 46 . 04 | Penyusunan Program Pembentukan Perda                                                       | Mewujudkan program pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah           | 6                                                                                     | 2                                                                           | 1                                                            | 1                                     | 100%                  | 1                                              | 4                                                                        | 67%                                          |
| H  |                         | Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum                                               |                                                                                             |                                                                                       |                                                                             |                                                              |                                       |                       |                                                |                                                                          |                                              |
| 32 | 4.01 . 4.01.3 . 47 . 05 | Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah                                    | Meningkatnya penataan sistem katalog produk hukum daerah                                    | 1800                                                                                  | 160                                                                         | 300                                                          | 460                                   | 153%                  | 300                                            | 920                                                                      | 51%                                          |
| 33 | 4.01 . 4.01.3 . 47 . 06 | Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah         | Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah         | 6500                                                                                  | 1189                                                                        | 1000                                                         | 878                                   | 88%                   | 0                                              | 2067                                                                     | 32%                                          |
| 34 | 4.01 . 4.01.3 . 47 . 07 | Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | Meningkatnya Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | 72                                                                                    | 24                                                                          | 1                                                            | 1                                     | 100%                  | 12                                             | 37                                                                       | 51%                                          |
| 35 | 4.01 . 4.01.3 . 47 . 10 | Publikasi Produk Hukum Daerah                                                              | Terlaksananya cetak dan penyebarluasan lembaran negara, lembaran daerah, dan berita daerah  | 1050                                                                                  | 210                                                                         | 200                                                          | 450                                   | 225%                  | 0                                              | 660                                                                      | 63%                                          |
| 36 | 4.01 . 4.01.3 . 47 . 11 | Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah                                              | Tersedianya buku-buku himpunan produk hukum daerah                                          | 3000                                                                                  | 545                                                                         | 300                                                          | 260                                   | 87%                   | 300                                            | 1105                                                                     | 37%                                          |

## **2.2. Analisis Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum**

Analisis Kinerja dan Pelayanan pada Biro Hukum berpedoman pada visi, misi serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta sosialisasi hukum.

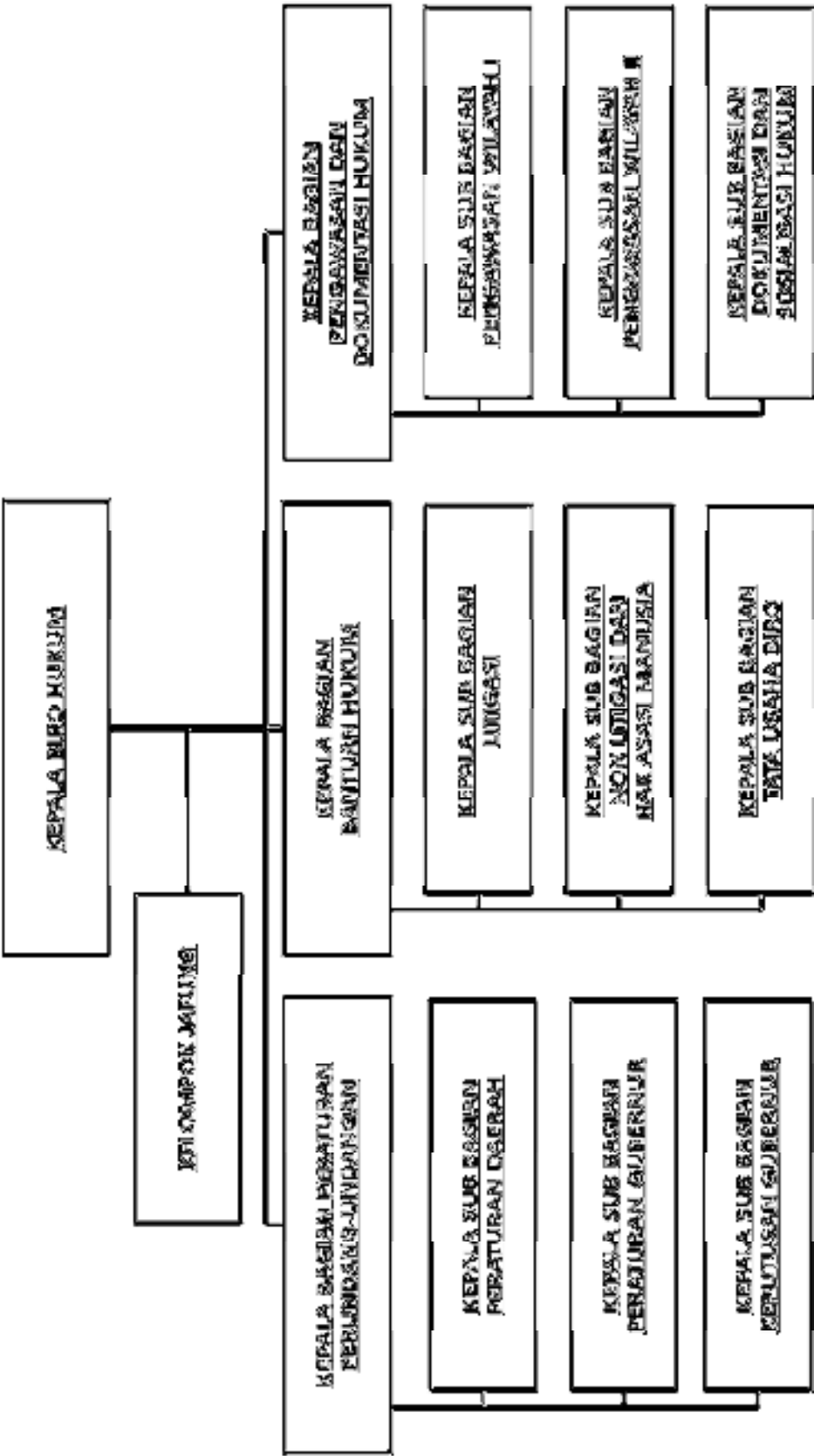
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- b. Pengoordinasian penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum Provinsi baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*);
- c. Pelaksanaan pengundangan produk hukum daerah Provinsi;

- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta sosialisasi hukum;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan struktur organisasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada gambar berikut :

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**2.2.2. Susunan Kepegawaian**

Susunan kepegawaian Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

a. Jumlah menurut Struktur Biro Hukum

- Kepala Biro 1 Orang
- Kepala Bagian 2 Orang
- Kepala Sub Bagian 9 Orang
- Staf PNS 18 Orang
- Tenaga Kontrak 20 Orang

b. Jumlah menurut Pendidikan Formal

- S3 0 Orang
- S2 6 Orang
- S1 34 Orang
- D3 3 Orang
- SLTA 7 Orang

c. Kepangkatan/ Gol. Ruang

- Golongan IV 4 Orang
- Golongan III 24 Orang
- Golongan II 2 Orang
- Golongan I - Orang

**2.2.3. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana Operasional Kantor yang telah ada saat ini sudah cukup baik dan telah terfasilitasi dengan baik, terdiri dari:

- Komputer                67 Unit
- Mesin Ketik            5 Unit
- Meja kerja              41 Buah
- Kursi kerja             58 Buah
- Lemari arsip           52 Buah
- Sofa/Kursi tamu       5 Set
- AC Split                14 Unit
- Mesin Fotocopy       2 unit

**2.2.4. Capaian Kinerja**

Pelaksanaan program kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Januari 2019 dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara detail dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah**

| No | Indikator                                                                                                           | SPM/ Standar Nasional                                                                              | IKK                                                                                                | Target Renstra Biro Hukum |      |      |      |      | Realisasi Capaian |         |         | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------|---------|---------|----------|------|------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                    | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2017              | 2018    | 2019    | 2020     | 2021 |                  |
| 1  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                  | 4                                                                                                  | 5                         | 6    | 7    | 8    | 8    | 9                 | 10      | 11      | 12       | 13   | 14               |
| 1  | Terlaksananya pengiriman surat/ Paket yang dikirim                                                                  | Jumlah Surat/ Paket yang dikirim                                                                   | Paket Pengelolaan Surat Menyurat                                                                   | 100                       | 100  | 100  | 100  | 100  | 0,0               | 14%     | 10%     | 100%     | 100% |                  |
| 2  | Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana Kantor                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia                                                   | Paket Pengadaan                                                                                    | 3                         | 1    | 3    | 3    | 3    | 1,333             | 400%    | 100%    | 100%     | 100% |                  |
| 3  | Terlaksananya pelayanan perbaikan peralatan kerja                                                                   | Jumlah Penyedia Jasa Pengelola Administrasi Keuangan                                               | Jumlah Dokumen Laporan                                                                             | 10                        | 10   | 10   | 10   | 10   | 110%              | 60,00%  | 50,00%  | 100%     | 100% |                  |
| 4  | Terlaksananya pengelolaan administrasi Keuangan                                                                     | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja                                                                   | Jumlah Peralatan yang diperbaiki                                                                   | 38                        | 38   | 38   | 38   | 38   | 100%              | 110,53% | 110,53% | 100%     | 100% |                  |
| 5  | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah                                               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Daerah yang dilaksanakan                                     | Jumlah perjalanan dinas luar daerah                                                                | 6                         | 10   | 10   | 10   | 10   | 50%               | 39,91%  | 60,00%  | 100%     | 100% |                  |
| 6  | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah                                              | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah yang dilaksanakan                                    | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah                                                               | 6                         | 10   | 12   | 14   | 14   | 80%               | 50,00%  | 100,00% | 100%     | 100% |                  |
| 7  | Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah.                                      | Jumlah Aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis                                                  | Jumlah Aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis                                                  | 40                        | 40   | 40   | 40   | 40   | 100%              | 0%      | 0%      | 100%     | 100% |                  |
| 8  | Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan teknis sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum | Jumlah Aparatur yang mempunyai kemampuan mengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum | Jumlah Aparatur yang mempunyai kemampuan mengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum | 30                        | 30   | 30   | 30   | 30   | 0%                | 0%      | 0%      | 0%       | 0%   |                  |
| 9  | Terwujudnya aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan                    | Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah                                                             | Jumlah aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan        | 8                         | 10   | 12   | 14   | 14   | 63%               | 20%     | 50%     | 100%     | 100% |                  |
| 10 | Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                 | 5                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 100%              | 100,00% | 100,00% | 100%     | 100% |                  |

| No | Indikator                                                                                                                                                           | Target SPM/ Standar Nasional                                                                     | Target IKK                                                                                       | Target Renstra Biro Hukum |      |      |      |      | Realisasi Capaian |         |          | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------|---------|----------|----------|------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                  | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2017              | 2018    | 2019     | 2020     | 2021 |                  |
| 1  | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                | 4                                                                                                | 5                         | 6    | 7    | 8    | 8    | 9                 | 10      | 11       | 12       | 13   | 14               |
| 11 | Terwujudnya laporan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja biro                                                                                                   | Jumlah Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja                                                  | Jumlah laporan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja biro                                     | 12                        | 12   | 12   | 12   | 12   | 100%              | 100,00% | 100,00%  | 100%     | 100% |                  |
| 12 | Meningkatnya kualitas peraturan daerah.                                                                                                                             | Jumlah Peraturan Daerah                                                                          | Jumlah Peraturan Daerah                                                                          | 10                        | 10   | 10   | 10   | 10   | 310%              | 400,00% | 100,00%  | 100%     | 100% |                  |
| 13 | Meningkatnya kualitas peraturan gubernur.                                                                                                                           | Jumlah Peraturan Gubernur                                                                        | Jumlah Peraturan Gubernur                                                                        | 50                        | 50   | 50   | 50   | 50   | 158%              | 126,00% | 100,00%  | 100%     | 100% |                  |
| 14 | Meningkatnya kualitas keputusan gubernur.                                                                                                                           | Jumlah Keputusan Gubernur                                                                        | Jumlah Keputusan Gubernur                                                                        | 1150                      | 1200 | 1350 | 1400 | 1400 | 114%              | 107,67% | 88,89%   | 100%     | 100% |                  |
| 15 | Tersusunnya Naskah Akademik Ranperda.                                                                                                                               | Jumlah Naskah Akademis                                                                           | Jumlah Naskah Akademis                                                                           | 2                         | 2    | 2    | 2    | 2    | 50%               | 100,00% | 100,00%  | 100%     | 100% |                  |
| 16 | Terwujudnya produk hukum daerah implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum                     | Jumlah Pengkajian Peraturan Perundang-undangan                                                   | Jumlah Pengkajian Peraturan Perundang-undangan                                                   | 1210                      | 1260 | 1410 | 1460 | 1460 | 114%              | 110,71% | 89,36%   | 100%     | 100% |                  |
| 17 | Terwujudnya rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang di evaluasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kebutuhan masyarakat | Jumlah Evaluasi dan pemantauan Produk Hukum Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Evaluasi dan pemantauan Produk Hukum Kabupaten/Kota                                       | 15                        | 15   | 15   | 15   | 15   | 93%               | 453,33% | 1193,33% | 100%     | 100% |                  |
| 18 | Terwujudnya pengawasan refresif produk hukum daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan secara proporsional dan perlindungan hak-hak masyarakat                    | Jumlah Pengawasan Produk Hukum Daerah                                                            | Jumlah Pengawasan Produk Hukum Daerah                                                            | 75                        | 81   | 87   | 93   | 93   | 216%              | 288,89% | 93,10%   | 100%     | 100% |                  |
| 19 | Terwujudnya rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan                          | Jumlah Penataan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Penataan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota                                               | 320                       | 327  | 335  | 343  | 343  | 119%              | 121,71% | 85,67%   | 100%     | 100% |                  |
| 20 | Terwujudnya rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan perancangan                                                               | Jumlah rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan perancangan | Jumlah rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan perancangan | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%              | 0,00%   | 100,00%  | 100%     | 100% |                  |

| No | Indikator                                                                                                                                                                                           | Target SPM/ Standar Nasional                                                                                                                                                               | Target IKK                                                                                                                                                                                 | Target Renstra Biro Hukum |      |      |      |      | Realisasi Capaian |         |         | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------|---------|---------|----------|------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017              | 2018    | 2019    | 2020     | 2021 |                  |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                          | 5                         | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                | 11      | 12      | 13       | 14   | 15               |
| 21 | Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan terindikasi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan | Rekomendasi terhadap Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota oleh Gubernur | Rekomendasi terhadap Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota oleh Gubernur | 0                         | 0    | 0    | 50   | 50   | 0%                | 0,00%   | 0,00%   | 100%     | 100% |                  |
| 22 | Terlaksananya Kerjasama Bidang Hukum dan HAM                                                                                                                                                        | Jumlah Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM                                                                                                                                             | Jumlah Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM                                                                                                                                             | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%              | 100,00% | 100,00% | 100%     | 100% |                  |
| 23 | Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan HAM                                                                                                                                    | Jumlah Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah                                                                                                                                            | Jumlah Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah                                                                                                                                            | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%              | 100%    | 100%    | 100%     | 100% |                  |
| 24 | Terlaksananya Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM                                                                                                                                       | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%              | 400,00% | 100,00% | 100%     | 100% |                  |
| 25 | Terlaksananya kegiatan pemyarakatan, diseminasi dan pendidikan HAM                                                                                                                                  | Jumlah Kegiatan Pendidikan HAM                                                                                                                                                             | Jumlah Kegiatan Pendidikan HAM                                                                                                                                                             | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 200%              | 100,00% | 300,00% | 100%     | 100% |                  |
| 26 | Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Provinsi                                                                                             | Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi                                                                                                                                | Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi                                                                                                                                | 10                        | 10   | 10   | 10   | 10   | 130%              | 110,00% | 100,00% | 100%     | 100% |                  |
| 27 | Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Provinsi                                                                                         | Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi                                                                                                                            | Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi                                                                                                                            | 15                        | 15   | 15   | 15   | 15   | 87%               | 20,00%  | 133,33% | 100%     | 100% |                  |

| No | Indikator                                                                                                                                                           | Target SPM/ Standar Nasional                                                                                                            | Target IKK                                                                                                                              | Target Renstra Biro Hukum |      |      |      |      | Realisasi Capaian |         |         | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------|---------|---------|----------|------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2017              | 2018    | 2019    | 2020     | 2021 |                  |
| 1  | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                       | 5                         | 6    | 7    | 8    | 8    | 9                 | 10      | 11      | 12       | 13   | 14               |
| 28 | Terlaksananya telaahan hukum terhadap dokumen Rancangan Kebijakan dan Produk Hukum serta Sosialisasi/penyuluhan hukum                                               | Jumlah dokumen telaahan Rancangan Kebijakan dan Produk Hukum                                                                            | Jumlah dokumen telaahan Rancangan Kebijakan dan Produk Hukum                                                                            | 0                         | 0    | 1    | 1    | 1    | 0%                | 0%      | 100%    | 100%     | 100% |                  |
| 29 | Terlaksananya mediasi penyelesaian proses penyerahan Gedung Batang Garing Business Center kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalimantan Tengah) | Jumlah Dokumen mediasi penyelesaian proses penyerahan Gedung Batang Garing Business Center Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen mediasi penyelesaian proses penyerahan Gedung Batang Garing Business Center Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 0                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 0%                | 100,00% | 100,00% | 100%     | 100% |                  |
| 30 | Tersedianya Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah                                                                               | Jumlah Dokumen Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah                             | Jumlah Dokumen Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah                             | 0                         | 0    | 0    | 12   | 12   | 0%                | 0,00%   | 0,00%   | 100%     | 100% |                  |
| 31 | Terwujudnya Program Pembentukan Perda yang berkualitas.                                                                                                             | Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                                                     | Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                                                     | 1                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%              | 100,00% | 100,00% | 100%     | 100% |                  |
| 32 | Terwujudnya Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah                                                                                                 | Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah                                                                                                      | Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah                                                                                                      | 300                       | 300  | 300  | 300  | 300  | 53%               | 153,33% | 100,00% | 100%     | 100% |                  |
| 33 | Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah                                                                      | Jumlah Data Produk Hukum Daerah                                                                                                         | Jumlah Data Produk Hukum Daerah                                                                                                         | 1000                      | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 68%               | 87,80%  | 0,00%   | 100%     | 100% |                  |
| 34 | Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah                                                              | Jumlah kegiatan pengelolaan website                                                                                                     | Jumlah kegiatan pengelolaan website                                                                                                     | 12                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%              | 100,00% | 100,00% | 100%     | 100% |                  |
| 35 | Terwujudnya Program Pembentukan Perda yang berkualitas.                                                                                                             | Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah                                                                                              | Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah                                                                                              | 150                       | 200  | 200  | 200  | 200  | 100%              | 225,00% | 0,00%   | 0%       | 0%   |                  |
| 36 | Meningkatnya jumlah buku himpunan produk hukum daerah                                                                                                               | Jumlah buku himpunan produk hukum daerah                                                                                                | Jumlah buku himpunan produk hukum daerah                                                                                                | 500                       | 500  | 500  | 500  | 500  | 54%               | 52,00%  | 60,00%  | 100%     | 100% |                  |

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Hukum.**

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan kembali dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru serta kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempengaruhi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020. Peraturan-peraturan terbaru yang harus disesuaikan dengan kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

#### **1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan sejak tanggal 2 Oktober 2014 dalam jangka waktu 2 tahun telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini berakibat tidak konsistennya penerapan dan implementasi di daerah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini sebagai payung hukum yang sifatnya umum dan luas, dirasa masih kurang memiliki peraturan pelaksana yang sifatnya operasional, sehingga menyulitkan dalam menyusun peraturan pelaksana di tingkat daerah.

Akan tetapi, meskipun terdapat kendala tersebut di atas, sangat disadari bahwa Biro Hukum dalam kapasitasnya sebagai salah satu institusi penyelenggaraan pemerintah daerah perlu lebih memahami spirit dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut agar dapat menuangkan

dan menerapkannya dalam rangka meningkatkan keutamaan pelayanan publik bagi masyarakat.

**2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengatur mengenai bentuk-bentuk produk hukum beserta teknis dan tata cara pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan adanya peraturan terbaru ini maka dalam pelaksanaan rencana kerja, beban kerja berdasarkan salah satu tugas pokok dan fungsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengoordinasian penyusunan dan perumusan produk hukum daerah harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

**3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019**

Presiden menetapkan 4) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 pada tanggal 10 April 2018. Peraturan Presiden ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Aksi HAM yang dimaksud di antaranya mencakup optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup kementerian dan lembaga yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan penanggung jawab masing-masing Menko, dan ukuran keberhasilannya laporan pelaksanaan Aksi HAM dari masing-masing kementerian/lembaga.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2020**

Rancangan Awal RKPD 2020 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan rencana kerja menggunakan perhitungan Analisis Standar Belanja dan menyesuaikan kembali kebutuhan belanja APBD berdasarkan penetapan Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2020.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

**Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

| No  | Rancangan Awal RKPD                               |                            |                                                  |                |                | Hasil analisa kebutuhan                           |                            |                                                  |                |                | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     | Prog / Keg                                        | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                | Target capaian | Pagu indikatif | Prog / Keg                                        | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                | Target capaian | Pagu indikatif |                 |
| (1) | (2)                                               | (3)                        | (4)                                              | (5)            | (6)            | (7)                                               | (8)                        | (9)                                              | (10)           | (11)           | (12)            |
|     |                                                   |                            |                                                  |                | 7.861.235.000  |                                                   |                            |                                                  |                | 7.861.235.000  |                 |
| A.  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        |                            |                                                  |                | 1.650.084.750  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        |                            |                                                  |                | 1.650.084.750  |                 |
| 1   | Penyediaan Jasa surat menyurat                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Surat/ Paket yang dikirim                 | 10             | 500.000        | Penyediaan Jasa surat menyurat                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Surat/ Paket yang dikirim                 | 10             | 500.000        |                 |
| 2   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia | 1              | 72.680.000     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia | 1              | 72.680.000     |                 |
| 3   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan           | 44             | 991.904.750    | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan           | 44             | 991.904.750    |                 |
| 4   | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja                 | 10             | 10.000.000     | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja                 | 10             | 10.000.000     |                 |

| No       | Rancangan Awal RKPD                                                         |                            |                                                                                                    |                |                    | Hasil analisa kebutuhan                                                     |                            |                                                                                                    |                |                    | Catatan Penting |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|          | Prog / Keg                                                                  | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                  | Target capaian | Pagu indikatif     | Prog / Keg                                                                  | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                  | Target capaian | Pagu indikatif     |                 |
| (1)      | (2)                                                                         | (3)                        | (4)                                                                                                | (5)            | (6)                | (7)                                                                         | (8)                        | (9)                                                                                                | (10)           | (11)               | (12)            |
| 5        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                        | Luar Provinsi              | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Daerah yang laksanakan                                       | 12             | 500.000.000        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                        | Luar Provinsi              | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Daerah yang laksanakan                                       | 12             | 500.000.000        |                 |
| 6        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                       | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah yang laksanakan                                      | 12             | 75.000.000         | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                       | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah yang laksanakan                                      | 12             | 75.000.000         |                 |
| <b>B</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                   |                            |                                                                                                    |                | <b>180.795.400</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                   |                            |                                                                                                    |                | <b>180.795.400</b> |                 |
| 7        | Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah                             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis                                                  | 0              | -                  | Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah                             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis                                                  | 0              | -                  |                 |
| 8        | Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Aparatur yang mempunyai kemampuan mengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum | 0              | -                  | Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Aparatur yang mempunyai kemampuan mengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum | 0              | -                  |                 |
| 9        | Sosialisasi produk hukum daerah                                             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah                                                             | 4              | 180.795.400        | Sosialisasi produk hukum daerah                                             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah                                                             | 4              | 180.795.400        |                 |

| No       | Rancangan Awal RKPD                                                      |                            |                                                                    |                |                      | Hasil analisa kebutuhan                                                  |                            |                                                                    |                |                      | Catatan Penting |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|          | Prog / Keg                                                               | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                  | Target capaian | Pagu indikatif       | Prog / Keg                                                               | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                  | Target capaian | Pagu indikatif       |                 |
| (1)      | (2)                                                                      | (3)                        | (4)                                                                | (5)            | (6)                  | (7)                                                                      | (8)                        | (9)                                                                | (10)           | (11)                 | (12)            |
| <b>C</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b> |                            |                                                                    |                | <b>235.575.000</b>   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b> |                            |                                                                    |                | <b>235.575.000</b>   |                 |
| 10       | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD   | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5              | 90.000.000           | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD   | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5              | 90.000.000           |                 |
| 11       | Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro                 | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja                    | 12             | 145.575.000          | Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro                 | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja                    | 12             | 145.575.000          |                 |
| <b>D</b> | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>                     |                            |                                                                    |                | <b>2.325.672.000</b> | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>                     |                            |                                                                    |                | <b>2.325.672.000</b> |                 |
| 12       | Penyusunan Peraturan Daerah                                              | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Peraturan Daerah                                            | 10             | 495.000.000          | Penyusunan Peraturan Daerah                                              | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Peraturan Daerah                                            | 10             | 495.000.000          |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD                             |                            |                                                                               |                |                | Hasil analisa kebutuhan                         |                            |                                                                               |                |                | Catatan Penting |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     | Prog / Keg                                      | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                             | Target capaian | Pagu indikatif | Prog / Keg                                      | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                             | Target capaian | Pagu indikatif |                 |
| (1) | (2)                                             | (3)                        | (4)                                                                           | (5)            | (6)            | (7)                                             | (8)                        | (9)                                                                           | (10)           | (11)           | (12)            |
| 13  | Penyusunan Peraturan Gubernur                   | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Peraturan Gubernur                                                     | 50             | 375.000.000    | Penyusunan Peraturan Gubernur                   | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Peraturan Gubernur                                                     | 50             | 375.000.000    |                 |
| 14  | Penyusunan Keputusan Gubernur                   | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Keputusan Gubernur                                                     | 750            | 225.000.000    | Penyusunan Keputusan Gubernur                   | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Keputusan Gubernur                                                     | 750            | 225.000.000    |                 |
| 15  | Penyusunan Naskah Akademis                      | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Penyusunan Naskah Akademis                                             | 1              | 60.000.000     | Penyusunan Naskah Akademis                      | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Penyusunan Naskah Akademis                                             | 1              | 60.000.000     |                 |
| 16  | Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Pengkajian Produk Hukum Daerah                                         | 4              | 125.000.000    | Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Pengkajian Produk Hukum Daerah                                         | 4              | 125.000.000    |                 |
| 17  | Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota  | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi           | 179            | 330.000.000    | Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota  | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi           | 179            | 330.000.000    |                 |
| 18  | Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah produk hukum kabupaten/ kota yang dilakukan pengawasan secara refresif | 81             | 100.000.000    | Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah produk hukum kabupaten/ kota yang dilakukan pengawasan secara refresif | 81             | 100.000.000    |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                      |                            |                                                                                                                                                               |                |                | Hasil analisa kebutuhan                                                                                  |                            |                                                                                                                                                               |                |                | Catatan Penting |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     | Prog / Keg                                                                                               | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                             | Target capaian | Pagu indikatif | Prog / Keg                                                                                               | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                             | Target capaian | Pagu indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                                                      | (3)                        | (4)                                                                                                                                                           | (5)            | (6)            | (7)                                                                                                      | (8)                        | (9)                                                                                                                                                           | (10)           | (11)           | (12)            |
| 19  | Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                     | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan                           | 287            | 215.672.000    | Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                     | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan                           | 287            | 215.672.000    |                 |
| 20  | Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota                                           | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan instrumen pemerintahan kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan                                                                          | 1              | 50.000.000     | Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota                                           | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan instrumen pemerintahan kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan                                                                          | 1              | 50.000.000     |                 |
| 21  | Pengkajian dan Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui Produk Hukum Daerah terlaksana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 50             | 350.000.000    | Pengkajian dan Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui Produk Hukum Daerah terlaksana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 50             | 350.000.000    | Keg. baru       |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                  |                            |                                                                        |                |                | Hasil analisa kebutuhan                              |                            |                                                                        |                |                | Catatan Penting |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     | Prog / Keg                                           | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                      | Target capaian | Pagu indikatif | Prog / Keg                                           | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                      | Target capaian | Pagu indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                  | (3)                        | (4)                                                                    | (5)            | (6)            | (7)                                                  | (8)                        | (9)                                                                    | (10)           | (11)           | (12)            |
| E   | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM          |                            |                                                                        |                | 309.000.000    | Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM          |                            |                                                                        |                | 309.000.000    |                 |
| 22  | Pengembangan Kerjasama Kesadaran Hukum dan HAM       | Provinsi Kalimantan Tengah | Tersedianya dokumen pengembangan kerjasama bidang hukum dan HAM        | 1              | 53.000.000     | Pengembangan Kerjasama Kesadaran Hukum dan HAM       | Provinsi Kalimantan Tengah | Tersedianya dokumen pengembangan kerjasama bidang hukum dan HAM        | 1              | 53.000.000     |                 |
| 23  | Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM                  | 1              | 50.000.000     | Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM                  | 1              | 50.000.000     |                 |
| 24  | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan HAM               | Provinsi Kalimantan Tengah | Tersedianya rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan HAM    | 1              | 153.000.000    | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan HAM               | Provinsi Kalimantan Tengah | Tersedianya rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan HAM    | 1              | 153.000.000    |                 |
| 25  | Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan permasyarakatan dan pendidikan HAM | 3              | 53.000.000     | Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan permasyarakatan dan pendidikan HAM | 3              | 53.000.000     |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                               |                            |                                                                                                                                                              |                |                | Hasil analisa kebutuhan                                                                           |                            |                                                                                                                                                              |                |                | Catatan Penting |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     | Prog / Keg                                                                                        | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Target capaian | Pagu indikatif | Prog / Keg                                                                                        | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Target capaian | Pagu indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                                               | (3)                        | (4)                                                                                                                                                          | (5)            | (6)            | (7)                                                                                               | (8)                        | (9)                                                                                                                                                          | (10)           | (11)           | (12)            |
| F   | Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum                                                   |                            |                                                                                                                                                              |                | 2.577.484.250  | Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum                                                   |                            |                                                                                                                                                              |                | 2.577.484.250  |                 |
| 26  | Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi                                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi                                                                                                  | 10             | 2.101.225.000  | Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi                                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi                                                                                                  | 10             | 2.101.225.000  |                 |
| 27  | Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi                                | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi                                                                                              | 5              | 100.000.000    | Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi                                | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi                                                                                              | 5              | 100.000.000    |                 |
| 28  | Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan dan Produk                                        | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen telaahan Rancangan Kebijakan dan Produk Hukum                                                                                                 | 1              | 110.000.000    | Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan dan Produk                                        | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen telaahan Rancangan Kebijakan dan Produk Hukum                                                                                                 | 1              | 110.000.000    | Keg. baru       |
| 29  | Penyelesaian Proses Penyerahan Gedung Busines Centre Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen mediasi penyelesaian proses penyerahan Gedung Batang Garing Business Center kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalimantan | 1              | 116.259.250    | Penyelesaian Proses Penyerahan Gedung Busines Centre Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen mediasi penyelesaian proses penyerahan Gedung Batang Garing Business Center kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalimantan | 1              | 116.259.250    |                 |

| No       | Rancangan Awal RKPD                                                             |                            |                                                                                                             |                |                    | Hasil analisa kebutuhan                                                         |                            |                                                                                                             |                |                    | Catatan Penting |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|          | Prog / Keg                                                                      | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                           | Target capaian | Pagu indikatif     | Prog / Keg                                                                      | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                                                                           | Target capaian | Pagu indikatif     |                 |
| (1)      | (2)                                                                             | (3)                        | (4)                                                                                                         | (5)            | (6)                | (7)                                                                             | (8)                        | (9)                                                                                                         | (10)           | (11)               | (12)            |
| 30       | Layanan dan Pertimbangan Hukum bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 12             | 150.000.000        | Layanan dan Pertimbangan Hukum bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 12             | 150.000.000        |                 |
| <b>G</b> | <b>Program Perencanaan Hukum</b>                                                |                            |                                                                                                             |                | <b>190.000.000</b> | <b>Program Perencanaan Hukum</b>                                                |                            |                                                                                                             |                | <b>190.000.000</b> |                 |
| 31       | Penyusunan Program Pembentukan Perda                                            | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Pembentukan Perda                                                   | 1              | 190.000.000        | Penyusunan Program Pembentukan Perda                                            | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Pembentukan Perda                                                   | 1              | 190.000.000        |                 |
| <b>H</b> | <b>Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum</b>                             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Penerbitan buku saku produk hukum daerah                                                             |                | <b>392.623.600</b> | <b>Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum</b>                             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Penerbitan buku saku produk hukum daerah                                                             |                | <b>392.623.600</b> |                 |
| 32       | Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah                         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah                                                                          | 400            | 50.000.000         | Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah                         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah                                                                          | 400            | 50.000.000         |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                        |                            |                                                   |                |                | Hasil analisa kebutuhan                                                                    |                            |                                                   |                |                | Catatan Penting |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     | Prog / Keg                                                                                 | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                 | Target capaian | Pagu indikatif | Prog / Keg                                                                                 | Lokasi                     | Indikator Kinerja                                 | Target capaian | Pagu indikatif |                 |
| (1) | (2)                                                                                        | (3)                        | (4)                                               | (5)            | (6)            | (7)                                                                                        | (8)                        | (9)                                               | (10)           | (11)           | (12)            |
| 33  | Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Data Produk Hukum Daerah secara elektronik | 750            | 60.000.000     | Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Data Produk Hukum Daerah secara elektronik | 750            | 60.000.000     |                 |
| 34  | Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah kegiatan pengelolaan website               | 1              | 250.000.000    | Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah kegiatan pengelolaan website               | 1              | 250.000.000    |                 |
| 35  | Publikasi Produk Hukum Daerah                                                              | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah        | 0              | -              | Publikasi Produk Hukum Daerah                                                              | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah        | 0              | -              |                 |
| 36  | Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah                                              | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah buku himpunan produk hukum daerah          | 400            | 60.000.000     | Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah                                              | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah buku himpunan produk hukum daerah          | 400            | 60.000.000     |                 |

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion FGD Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan tengah tahun 2019 yang melibatkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota, tidak terdapat usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan yang bersumber dari SKPD Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat usulan Program dan Kegiatan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut.

Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan baik hal-hal yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD Provinsi, maupun dari SKPD Kab/Kota yang ditujukan kepada SKPD Provinsi, merupakan suatu tindak lanjut dan amanat Undang-Undang yang harus diterjemahkan dalam Program/Kegiatan yang terkait dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam menyusun program dan kegiatan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
  - Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk Rencana Kerja Tahun 2020 dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

| No. | Program dan Kegiatan                              | Lokasi                     | Indikator                              | Besaran / Volume        | Catatan |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2)                                               | (3)                        | (4)                                    | (5)                     | (6)     |
| 1   | Penyediaan jasa surat menyurat                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Surat/ Paket yang dikirim       | 10 Surat/ Paket         |         |
| 2   | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah pengadaan barang/jasa           | 1 pengadaan barang/jasa |         |
| 3   | Penyediaan jasa administrasi keuangan             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan | 44 Orang                |         |

| No. | Program dan Kegiatan                                                        | Lokasi                     | Indikator                                                                      | Besaran / Volume                                              | Catatan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                                                         | (3)                        | (4)                                                                            | (5)                                                           | (6)     |
| 4   | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                                   | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah perbaikan peralatan kerja                                               | 10 perbaikan peralatan kerja                                  |         |
| 5   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                        | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi di Luar Daerah yang dilaksanakan  | 12 Kegiatan Rapat Koordinasi luar daerah                      |         |
| 6   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                       | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah yang dilaksanakan | 12 Kegiatan Rapat Koordinasi dalam daerah                     |         |
| 7   | Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah                             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis                                | -                                                             |         |
| 8   | Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis                                | -                                                             |         |
| 9   | Sosialisasi Produk Hukum Daerah                                             | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah kabupaten yang mendapatkan sosialisasi                                  | 4 kegiatan sosialisasi                                        |         |
| 10  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD      | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD             | 5 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |         |
| 11  | Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro                   | 12 Laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro      |         |
| 12  | Penyusunan Peraturan Daerah                                                 | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun dan diharmonisasi.              | 10 Ranperda                                                   |         |
| 13  | Penyusunan Peraturan Gubernur                                               | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan peraturan gubernur yang disusun dan diharmonisasi.            | 50 Ranpergub                                                  |         |
| 14  | Penyusunan Keputusan Gubernur                                               | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan keputusan gubernur yang disusun dan diharmonisasi.            | 750 Rankepgub                                                 |         |
| 15  | Penyusunan Naskah Akademis                                                  | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Naskah Akademik.                                                        | 1 Naskah Akademik                                             |         |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                                     | Lokasi                     | Indikator                                                                                                                                                     | Besaran / Volume                                   | Catatan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                                                                                      | (3)                        | (4)                                                                                                                                                           | (5)                                                | (6)     |
| 16  | Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan                                                                  | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen hasil kajian.                                                                                                                                  | 4 dokumen                                          |         |
| 17  | Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                           | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan produk hukum Kabupaten/kota yang dievaluasi                                                                                                  | 179 rancangan produk hukum Kabupaten/kota          |         |
| 18  | Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                          | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah produk hukum Kabupaten/kota yang mendapatkan pengawasan refresif                                                                                       | 81 produk hukum Kabupaten/kota                     |         |
| 19  | Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                     | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan produk hukum Kabupaten/kota yang di analisa                                                                                                  | 287 rancangan produk hukum Kabupaten/kota          |         |
| 20  | Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota                                           | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah rancangan Instrumen Hukum Pemerintahan Kabupaten/Kota                                                                                                  | 1 rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota  |         |
| 21  | Pengkajian dan Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui Produk Hukum Daerah terlaksana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 50 Peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan DPRD |         |
| 22  | Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM                                                              | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM                                                                                                                | 1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM  |         |
| 23  | Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM                                                     | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum                                                                                                                      | 1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum        |         |
| 24  | Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM                                                                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi                                                                                                                        | 1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi                  |         |
| 25  | Pemasyarakatan HAM dan Pendidikan HAM                                                                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Kegiatan Pendidikan HAM                                                                                                                                | 3 Kegiatan Pendidikan HAM                          |         |
| 26  | Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi                                           | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Perkara Litigasi                                                                                                                                       | 10 Perkara Litigasi                                |         |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                               | Lokasi                     | Indikator                                                                                                                                                            | Besaran / Volume                            | Catatan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                                                                                | (3)                        | (4)                                                                                                                                                                  | (5)                                         | (6)     |
| 27  | Pemberian bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi                                 | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Kasus Non Litigasi                                                                                                                                            | 5 Kasus Non Litigasi                        |         |
| 28  | Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan dan Produk Hukum                                   | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen telaahan Rancangan Kebijakan dan Produk Hukum                                                                                                         | 1 Dokumen                                   |         |
| 29  | Penyelesaian Proses Penyerahan Gedung Business Centre Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen mediasi penyelesaian proses penyerahan Gedung Batang Garing Business Center kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalimantan Tengah) | 1 Dokumen                                   |         |
| 30  | Layanan dan Pertimbangan Hukum bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah                    | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah                                                          | 12 Dokumen                                  |         |
| 31  | Penyusunan Program Pembentukan Perda                                                               | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Program pembentukan perda                                                                                                                                     | 1 Program pembentukan perda                 |         |
| 32  | Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah                                            | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah                                                                                                                                   | 400 Katalog                                 |         |
| 33  | Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah                 | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Data Produk Hukum Daerah secara elektronik                                                                                                                    | 750 Data Produk Hukum Daerah                |         |
| 34  | Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah         | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah kegiatan pengelolaan website JDIH                                                                                                                             | 1 laporan kegiatan pengelolaan website JDIH |         |
| 35  | Publikasi Produk Hukum Daerah                                                                      | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Cetak Publikasi                                                                                                                                               | -                                           |         |
| 36  | Menerbitkan Buku Himpunan Produk Hukum Daerah                                                      | Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Buku Himpunan Produk Hukum Daerah                                                                                                                             | 400 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah       |         |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan UUD 1945, arah dan kebijakan pembangunan nasional, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025, maka pelaksanaan tugas yang ada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan arah kebijakan Prolegnas tahun 2015 – 2019 yaitu :

4. Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.
5. Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa.
6. Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Melalui arah kebijakan Prolegnas 2015 – 2019 tersebut juga pemerintah pusat membuat arah kebijakan bidang hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yaitu:

1. Melaksanakan penegakan hukum dan masyarakat.
2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat.
3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka program dan kegiatan dan terlaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah wajib bersinergi dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Prolegnas 2015-2019 maupun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

#### **3.2.1 Tujuan**

1. Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum.
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.
3. Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat.
4. Menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kerja.

#### **3.2.2 Sasaran**

1. Terwujudnya koordinasi yang efektif dan efisien dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan.
2. Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2020 berdasarkan jumlah belanja pegawai, jumlah belanja barang dan jasa, serta belanja modal dipersiapkan dalam rangka memenuhi target kinerja dengan rincian Pelaksanaan Rencana Kerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

##### **1. Nilai Belanja pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020**

Pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020, total Anggaran berdasarkan estimasi perencanaan adalah sebesar Rp. 8.231.760.111,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sati Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Sebelas Rupiah Puluh Rupiah).

##### **2. Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Kegiatan untuk mengakomodir fasilitas sarana dan prasarana, dokumentasi hukum, peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, bantuan hukum, serta koordinasi pemenuhan hak asasi manusia. Adapun program dan kegiatan yang ada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

## **2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah
- b. Sosialisasi Produk Hukum Daerah

## **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro

## **4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Penyusunan Peraturan Daerah
- b. Penyusunan Peraturan Gubernur
- c. Penyusunan Keputusan Gubernur
- d. Penyusunan Naskah Akademis
- e. Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
- f. Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota
- g. Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota
- h. Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota
- i. Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota
- j. Pengkajian dan Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah

Penjelasan : Kegiatan ini merupakan usulan kegiatan baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang baru diundangkan pada tanggal 20 Februari 2019 terdapat penambahan fungsi yaitu :

- 1) Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
- 2) Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

## **5. Peningkatan Kesadaran Hukum Dan HAM**

- a. Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM
- b. Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Menurut Perspektif HAM
- c. Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan HAM
- d. Pemasyarakatan HAM Dan Pendidikan HAM

## **6. Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum**

- a. Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi
- b. Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi
- c. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan dan Produk Hukum
- d. Penyelesaian Proses Penyerahan Gedung Batang Garing Business Center kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Layanan dan Pertimbangan Hukum bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Penjelasan : Kegiatan ini merupakan usulan kegiatan baru Pasal 48 huruf f Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : Biro Hukum mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi.

## **7. Program Perencanaan Hukum**

- a. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

## **8. Program Pembinaan Sarana Dan Prasarana Hukum**

- a. Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah
- b. Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah
- c. Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah
- d. Publikasi Produk Hukum Daerah
- e. Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan seperti yang tercantum dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2020**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2021**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

| Kode                     | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan    | Rencana Tahun 2020         |                              |                                |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 |                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                          |                                                        |                                        | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja       | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Tahun 2020                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                        | 2                                                      | 3                                      | 4                          | 5                            | 6                              | 7           | 8               | 9                                 | 10                             |
| 4.06 . 4.06.01 . 01      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             |                                        |                            |                              |                                |             |                 |                                   |                                |
| 4.06 . 4.06.01 . 01 .01  | Penyediaan jasa surat menyurat                         | Jumlah Surat/ Paket yang dikirim       | Provinsi Kalimantan Tengah | 10 Surat/ Paket              | 500.000                        | APBD        |                 | 100 Surat/ Paket                  | 600.000                        |
| 4.06 . 4.06.01 . 01 . 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor      | Jumlah pengadaan barang/jasa           | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 pengadaan barang/jasa      | 72.680.000                     | APBD        |                 | 3 pengadaan barang/jasa           | 87.216.000                     |
| 4.06 . 4.06.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan                  | Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan | Provinsi Kalimantan Tengah | 44 Orang                     | 991.904.750                    | APBD        |                 | 38 Orang                          | 1.190.285.700                  |
| 4.06 . 4.06.01 . 01 . 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja              | Jumlah perbaikan peralatan kerja       | Provinsi Kalimantan Tengah | 10 perbaikan peralatan kerja | 10.000.000                     | APBD        |                 | 10 perbaikan peralatan kerja      | 12.000.000                     |

| Kode                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                                | Rencana Tahun 2020         |                                           |                                |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021         |                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                             |                                                                                                    | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Tahun 2020                                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                          | 2                                                                           | 3                                                                                                  | 4                          | 5                                         | 6                              | 7           | 8               | 9                                         | 10                             |
| 4.06 . 4.06.01 . 01 . 18   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                        | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi di Luar Daerah yang dilaksanakan                      | Provinsi Kalimantan Tengah | 12 Kegiatan Rapat Koordinasi luar daerah  | 500.000.000                    | APBD        |                 | 14 Kegiatan Rapat Koordinasi luar daerah  | 600.000.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 01 . 19   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                       | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi di Dalam Daerah yang dilaksanakan                     | Provinsi Kalimantan Tengah | 12 Kegiatan Rapat Koordinasi dalam daerah | 75.000.000                     | APBD        |                 | 14 Kegiatan Rapat Koordinasi dalam daerah | 90.000.000                     |
| <b>4.06 . 4.06.01 . 05</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                   |                                                                                                    |                            |                                           |                                |             |                 |                                           |                                |
| 4.06 . 4.06.01 . 05 . 114  | Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah                             | Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis                                                    | Provinsi Kalimantan Tengah | -                                         | -                              | APBD        |                 | -                                         | -                              |
| 4.06 . 4.06.01 . 05 . 115  | Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | Jumlah Aparatur yang mempunyai kemampuan mengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum | Provinsi Kalimantan Tengah | -                                         | -                              | APBD        |                 | -                                         | -                              |

| Kode                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                | Rencana Tahun 2020         |                                                               |                                |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021                             |                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                       |                                                                    | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja                                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Tahun 2020                                                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                          | 2                                                                                     | 3                                                                  | 4                          | 5                                                             | 6                              | 7           | 8               | 9                                                             | 10                             |
| 4.06 . 4.06.01 . 05 . 125  | Sosialisasi Produk Hukum Daerah                                                       | Jumlah kabupaten yang mendapatkan sosialisasi                      | Provinsi Kalimantan Tengah | 4 kegiatan sosialisasi                                        | 180.795.400                    | APBD        |                 | 14 kegiatan sosialisasi                                       | 216.954.480                    |
| <b>4.06 . 4.06.01 . 06</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |                                                                    |                            |                                                               |                                |             |                 |                                                               |                                |
| 4.06 . 4.06.01 . 06 . 01   | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Provinsi Kalimantan Tengah | 5 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 90.000.000                     | APBD        |                 | 5 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 108.000.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 06 . 57   | Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro                              | Jumlah laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro       | Provinsi Kalimantan Tengah | 12 Laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro      | 145.575.000                    | APBD        |                 | 12 Laporan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro      | 174.690.000                    |
| <b>4.06 . 4.06.01 . 18</b> | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>                                  |                                                                    |                            |                                                               |                                |             |                 |                                                               |                                |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 18   | Penyusunan Peraturan Daerah                                                           | Jumlah rancangan peraturan daerah yang disusun dan diharmonisasi.  | Provinsi Kalimantan Tengah | 10 Ranperda                                                   | 495.000.000                    | APBD        |                 | 10 Ranperda                                                   | 594.000.000                    |

| Kode                     | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                     | Rencana Tahun 2020         |                                            |                                |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021         |                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                          |                                                        |                                                                         | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Tahun 2020                                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                        | 2                                                      | 3                                                                       | 4                          | 5                                          | 6                              | 7           | 8               | 9                                         | 10                             |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 19 | Penyusunan Peraturan Gubernur                          | Jumlah rancangan peraturan gubernur yang disusun dan diharmonisasi.     | Provinsi Kalimantan Tengah | 50 Ranpergub                               | 375.000.000                    | APBD        |                 | 50 Ranpergub                              | 450.000.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 20 | Penyusunan Keputusan Gubernur                          | Jumlah rancangan keputusan gubernur yang disusun dan diharmonisasi.     | Provinsi Kalimantan Tengah | 750 Rankepgub                              | 225.000.000                    | APBD        |                 | 1400 Rankepgub                            | 270.000.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 21 | Penyusunan Naskah Akademis                             | Jumlah Naskah Akademik.                                                 | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Naskah Akademik                          | 60.000.000                     | APBD        |                 | 2 Naskah Akademik                         | 72.000.000                     |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 22 | Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah dokumen hasil kajian.                                            | Provinsi Kalimantan Tengah | 4 dokumen                                  | 125.000.000                    | APBD        |                 | 12 dokumen                                | 150.000.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 23 | Evaluasi Rancangann Produk Hukum Kabupaten/Kota        | Jumlah rancangan produk hukum Kabupaten/kota yang dievaluasi            | Provinsi Kalimantan Tengah | 179 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota | 330.000.000                    | APBD        |                 | 15 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota | 396.000.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 24 | Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota        | Jumlah produk hukum Kabupaten/kota yang mendapatkan pengawasan refresif | Provinsi Kalimantan Tengah | 81 produk hukum Kabupaten/ kota            | 100.000.000                    | APBD        |                 | 93 produk hukum Kabupaten/ kota           | 120.000.000                    |

| Kode                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                               | Rencana Tahun 2020         |                                                    |                                |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021                  |                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                          |                                                                   | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja                             | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Tahun 2020                                         | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                          | 2                                                                                                        | 3                                                                 | 4                          | 5                                                  | 6                              | 7           | 8               | 9                                                  | 10                             |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 25   | Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah rancangan produk hukum Kabupaten/kota yang di analisa      | Provinsi Kalimantan Tengah | 287 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota         | 215.672.000                    | APBD        |                 | 343 rancangan produk hukum Kabupaten/ kota         | 258.806.400                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 27   | Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah rancangan Instrumen Hukum Pemerintahan Kabupaten/Kota      | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/ Kota | 50.000.000                     | APBD        |                 | 1 rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/ Kota | 60.000.000                     |
| 4.06 . 4.06.01 . 18 . 28   | Pengkajian dan Pembatalan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pembatalan Produk Hukum Kabupaten/Kota | Provinsi Kalimantan Tengah | 50 Peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan DPRD | 350.000.000                    | APBD        |                 | 50 Peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan DPRD | 420.000.000                    |
| <b>4.06 . 4.06.01 . 19</b> | <b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM</b>                                                       |                                                                   |                            |                                                    |                                |             |                 |                                                    |                                |
| 4.06 . 4.06.01 . 19 . 02   | Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM                                                              | Jumlah Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM                    | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM  | 53.000.000                     | APBD        |                 | 1 Dokumen Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM  | 63.600.000                     |

| Kode                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan      | Rencana Tahun 2020         |                                             |                                |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021           |                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                    |                                          | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja                      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Tahun 2020                                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                          | 2                                                                  | 3                                        | 4                          | 5                                           | 6                              | 7           | 8               | 9                                           | 10                             |
| 4.06 . 4.06.01 . 19 . 04   | Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM               | Jumlah Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum | 50.000.000                     | APBD        |                 | 1 Dokumen Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum | 60.000.000                     |
| 4.06 . 4.06.01 . 19 . 05   | Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM                              | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi   | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi           | 153.000.000                    | APBD        |                 | 1 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi           | 183.600.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 19 . 06   | Pemasyarakatan HAM dan Pendidikan HAM                              | Jumlah Kegiatan Pendidikan HAM           | Provinsi Kalimantan Tengah | 3 Kegiatan Pendidikan HAM                   | 53.000.000                     | APBD        |                 | 3 Kegiatan Pendidikan HAM                   | 63.600.000                     |
| <b>4.06 . 4.06.01 . 20</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum</b>             |                                          |                            |                                             |                                |             |                 |                                             |                                |
| 4.06 . 4.06.01 . 20 . 02   | Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi     | Jumlah Perkara Litigasi                  | Provinsi Kalimantan Tengah | 10 Perkara Litigasi                         | 2.101.225.000                  | APBD        |                 | 10 Perkara Litigasi                         | 2.521.470.000                  |
| 4.06 . 4.06.01 . 20 . 03   | Pemberian bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi | Jumlah Kasus Non Litigasi                | Provinsi Kalimantan Tengah | 5 Kasus Non Litigasi                        | 100.000.000                    | APBD        |                 | 15 Kasus Non Litigasi                       | 120.000.000                    |

| Kode                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                           | Rencana Tahun 2020         |                             |                                |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 |                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                            |                                                                                                   |                                                                               | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Tahun 2020                        | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                          | 2                                                                                                 | 3                                                                             | 4                          | 5                           | 6                              | 7           | 8               | 9                                 | 10                             |
| 4.06 . 4.06.01 . 20 . 04   | Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan dan Produk Hukum                                  | Jumlah dokumen telaahan Rancangan Kebijakan dan Produk Hukum                  | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Dokumen Telaahan          | 110.000.000                    | APBD        |                 | 1 Dokumen Telaahan                | 132.000.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 20 . 05   | Penyelesaian Proses Penyerahan Gedung Busines Centre Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah Dokumen mediasi proses penyerahan Gedung Batang Garing Business Center | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Dokumen                   | 116.259.250                    | APBD        |                 | 1 Dokumen                         | 139.511.100                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 20 . 06   | Layanan dan Pertimbangan Hukum bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah                   | Jumlah Dokumen Layanan Hukum                                                  | Provinsi Kalimantan Tengah | 12 Dokumen Layanan Hukum    | 150.000.000                    | APBD        |                 | 12 Dokumen Layanan Hukum          | 180.000.000                    |
| <b>4.06 . 4.06.01 . 21</b> | <b>Program Perencanaan Hukum</b>                                                                  |                                                                               |                            |                             |                                |             |                 |                                   |                                |
| 4.06 . 4.06.01 . 21 . 04   | Penyusunan Program Pembentukan Perda                                                              | Jumlah Program pembentukan perda                                              | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Program pembentukan perda | 190.000.000                    | APBD        |                 | 1 Program pembentukan perda       | 228.000.000                    |

| Kode                     | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan               | Rencana Tahun 2020         |                                       |                                |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021     |                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                          |                                                                                            |                                                   | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Tahun 2020                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                        | 2                                                                                          | 3                                                 | 4                          | 5                                     | 6                              | 7           | 8               | 9                                     | 10                             |
| 4.06 . 4.06.01 . 22      | Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum                                               |                                                   |                            |                                       |                                |             |                 |                                       |                                |
| 4.06 . 4.06.01 . 22 . 05 | Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah                                    | Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah                | Provinsi Kalimantan Tengah | 400 Katalog                           | 50.000.000                     | APBD        |                 | 300 Katalog                           | 60.000.000                     |
| 4.06 . 4.06.01 . 22 . 06 | Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah         | Jumlah Data Produk Hukum Daerah secara elektronik | Provinsi Kalimantan Tengah | 750 Data Produk Hukum Daerah          | 100.000.000                    | APBD        |                 | 750 Data Produk Hukum Daerah          | 120.000.000                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 22 . 07 | Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah | Jumlah kegiatan pengelolaan website JDIH          | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 kegiatan pengelolaan website JDIH   | 189.204.600                    | APBD        |                 | 12 kegiatan pengelolaan website JDIH  | 227.045.520                    |
| 4.06 . 4.06.01 . 22 . 10 | Publikasi Produk Hukum Daerah                                                              | Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah        | Provinsi Kalimantan Tengah | -                                     | -                              | APBD        |                 | -                                     | -                              |
| 4.06 . 4.06.01 . 22 . 11 | Menerbitkan Buku Himpunan Produk Hukum Daerah                                              | Jumlah Buku Himpunan Produk Hukum Daerah          | Provinsi Kalimantan Tengah | 400 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah | 53.419.000                     | APBD        |                 | 500 Buku Himpunan Produk Hukum Daerah | 64.102.800                     |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Tahun 2020 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi disusun sebagai bahan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam usaha untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Palangka Raya,      Juni 2019

KEPALA BIRO HUKUM,

**TTD**

**SARING, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650510 198703 1 003